

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran)**

**Yayan Maryana<sup>1</sup>, Cecep Cahya Supena<sup>2</sup>, Erlan Suwarlan<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : yayan1813@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah selama ini masih kurang optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas dalam melakukan pengelolaan sampah. Kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan lingkungan ekonomi sosial dan politik dalam memperlancar pengelolaan sampah. Adanya berbagai hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dan operasional pengelolaan sampah. Adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yang antara lain dengan melakukan kegiatan pengarahan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, upaya lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran yaitu dengan mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah serta melakukan peningkatan kegiatan pemungutan retribusi sampah sehingga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah.*

**Kata Kunci :** *Implementasi kebijakan, Pengelolaan sampah, Lingkungan hidup*

## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri yang semakin pesat akan memberikan dampak pada jumlah sampah yang dihasilkan, antara lain; sampah plastik, kertas, atau produk kemasan yang mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Jumlah dan jenis sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang dikonsumsi, semakin meningkat perekonomian dalam rumah tangga maka semakin bervariasi jumlah sampah yang dihasilkan. Selain kondisi tersebut masih dijumpai timbunan atau buangan sampah di sungai sehingga memberikan dampak negatif pada lingkungan yang akhirnya mengganggu kesehatan manusia.

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik, Hal itu sesuai dengan pendapat Damanhuri (2005:1-1) bahwa:

Umumnya kota di Indonesia, hampir semua kota baik kota besar maupun kota kecil memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Adapun pengelolaan sampah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir, sebagaimana Nurhayati (2013:35) berpendapat bahwa:

Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Pengurangan sampah sendiri dilakukan dengan proses 3R (*Reuse, Recycle* dan *Reduce*). Hal ini karena sampai saat ini proses 3R dianggap yang paling sesuai dalam mengurangi sampah di kota maupun wilayah karena mampu mengurangi timbulan sampah sebesar 15-20 %. Sedangkan untuk penanganan sampah merupakan hal teknis dalam mengelolah sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada pemrosesan akhir. Kedua fokus pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun penanganan sampah merupakan amanat dari UU pengelolaan sampah di Indonesia sehingga harus ditindak lanjuti dengan Perda pengelolaan sampah untuk setiap daerah dan juga digunakan

sebagai metode dalam pengelolaan sampah setiap kota, wilayah maupun kawasan.

Sekaitan dengan hal itu, produsen sampah utama adalah masyarakat, sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi. Konsep penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah yang dimulai di sumber. Semakin dekat dengan sumbernya maka semakin besar rasa memiliki dan rasa tanggung jawab orang untuk mengelola sampahnya. Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, karena jika dikelola oleh pihak lain biasanya mereka kurang bertanggung jawab bahkan cenderung destruktif.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, dan kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Sampah dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan tepat, karena dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mencemari ekosistem tanah, air, dan udara.

Kabupaten Pangandaran adalah Kabupaten termuda di Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di kabupaten Pangandaran yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Nopember 2012. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.010,92 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 Kecamatan dan 93 Desa, yaitu Kecamatan yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Sebelah Timur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Sebelah Selatan Samudera Hindia, Sebelah Barat Kabupaten Tasikmalaya. Untuk pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Berada di kecamatan Parigi.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu

bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan/tetap, sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang.

Oleh karena itu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai sehingga penanganan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pangandaran tidak berjalan optimal. Seperti halnya kontainer, truk sampah, keranjang dorong bahkan beberapa bak sampah juga rusak. Dari 8 unit armada dum truk pengangkut sampah yang ada saat ini setengahnya tidak layak pakai karena sudah tua produksi tahun 1985. Sarana prasarana lain yang kondisinya rusak yaitu, kontainer, crane, loader buldozer dan excavator. Idealnya untuk kebutuhan sarana armada truk pengangkut sampah setidaknya lebih

dari 20 unit. Sedangkan kondisi saat ini pelayanan di wilayah objek wisata pangandaran saja hanya ada lima unit. Sisanya disebar di kecamatan lain seperti parigi dua unit, Cijulang dua unit. Selain itu saat ini karyawan kebersihan yang tersebar di Kabupaten Pangandaran hanya berjumlah 17 orang.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, volume sampah yang dihasilkan di Kecamatan Pangandaran pada tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dapat mencapai 25.043 M<sup>3</sup>. Pada saat hari-hari besar atau hari raya khususnya di daerah wisata, volume sampah baru dapat terangkut beberapa hari atau kadang-kadang menimbulkan protes atau sorotan dari warga maupun pengunjung wisata. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, selama musim liburan terjadi lonjakan sampah yang signifikan di wilayahnya, terutama di kawasan pantai. Berdasarkan data sementara, peningkatan sampah per harinya mencapai 400 persen. Dalam satu hari, kendaraan pengangkut sampah yang bisa beroperasi 8-13 rit, melonjak bisa sampai 40 rit (1 rit biasanya 5 m<sup>3</sup> sampah).

Begitupula dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Pangandaran selama ini masih kurang optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan seperti sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sehingga masih banyaknya sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan timbulnya bau busuk. Contohnya : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya memiliki 7 mobil pengangkut sampah sementara wilayah yang harus dilayani cukup banyak sehingga berdampak pada ketidakesesuaian jadwal pengangkutan yang berdampak pada banyaknya sampah yang tidak terangkut.
2. Kurangnya dukungan ekonomi, sosial dan politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan sampah hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas fisik tempat pembuangan sampah yang masih kurang. Contohnya : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menyediakan fasilitas pembuangan sampah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga ketersediaan tong sampah masih kurang yang pada akhirnya menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

3. Kurangnya pemahaman petugas terhadap standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah. Contohnya pegawai kurang memiliki kesanggupan dalam membantu mengatasi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kepastian dalam memberikan pelayanan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul “Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi Analisis di Kecamatan Pangandaran)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Selanjutnya Abdullah (2007:5) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah “Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan oleh individu, pejabat, kelompok, badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Pengelolaan sampah telah menjadi suatu permasalahan penting dan mendesak bagi para pengambil kebijakan seiring dengan peningkatan secara signifikan jumlah sampah yang dihasilkan dan perubahan karakteristik sampah akibat perubahan gaya hidup masyarakat, industrialisasi dan urbanisasi.

Pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pembangunan. Timbulan sampah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejalan dengan

pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dirumuskan bahwa :

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Nugroho (2013:98) menyatakan bahwa : “Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar”.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi

kehidupan sehingga keberadaan sampah perlu adanya pengelolaan sampah yang benar.

Menurut Mulia (2015:15) pengertian pengelolaan sampah adalah:

Pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara merujuk pada dasar–dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa.

Syafrudin dan Priyambada (2011:77), menyatakan :

Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan ke sehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis.

Rahardyan dan Widagdo (2015:98) menyatakan bahwa : ”Sistem pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur”.

Dengan demikian dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlu memperhatikan berbagai

variabel yang mempengaruhi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Adapun variabel-variabel tersebut menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2016:165) adalah:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Penelitian ini menggunakan teori mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Wahab, (2016:165). Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk lebih memfokuskan pada peran aktor yang terlibat dalam pengelola sampah karena mereka merupakan bagian implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tidak hanya itu, aktor-aktor tersebut juga memiliki peran dan fungsinya untuk dapat saling melengkapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana variabel-variabel tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan sampah sehingga melalui penelitian ini nantinya akan diketahui apakah variabel-variabel tersebut sudah dilaksanakan secara optimal atau belum

sehingga nantinya akan mempengaruhi kelancaran proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong, (2014:2) yang bertujuan “Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi”. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa serta menginterpretasikannya data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan dalam hal pengelolaan sampah yang sering terjadi di Kecamatan Pangandaran antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran memiliki keterbatasan sumber daya, anggaran,

dan kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Pangandaran yang hasilnya sebagai berikut.

### **1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan**

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Pangandaran belum tercapai secara optimal mengingat kurangnya pemahaman petugas terhadap standar dan tujuan kebijakan sehingga sasaran kebijakan belum dapat dicapai secara optimal.

Menurut Agustino (2016:109) menyatakan bahwa :

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal



(*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dengan demikian dalam implementasi pengelolaan sampah maka petugas belum dapat memahami maksud dari tujuan dan sasaran kebijakan sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan komunikasi dengan petugas pengelola sampah sehingga dapat memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah selain itu perlunya kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah agar tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara optimal.

## **2. Sumber-sumber kebijakan**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sumber-sumber kebijakan kurang menunjang dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah di Kecamatan Pangandaran belum dapat di atasi secara optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta keterbatasan anggaran yang diberikan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dapat digunakan petugas dalam melakukan pengelolaan sampah.

Menurut Subarsono (2011:119) menyatakan bahwa : "Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam implementasi suatu kebijakan faktor sumber daya sangatlah

penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Begitupula dengan implementasi pengelolaan sampah maka dukungan sumber daya manusia dalam hal ini petugas pengelola sampah sangatlah penting karena merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dengan memadainya jumlah petugas maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu keterbatasan anggaran yang diberikan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena dengan anggaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan maka pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan begitupula dengan sarana maupun prasarana yang menunjang proses pengangkutan maupun pengelolaan sampah tentunya akan sangat mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

### **3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi dari pelaksana kebijakan publik adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui tetapi mempunyai

kemampuan untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana belum menunjang dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas pengelola sampah sehingga menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai, kurangnya dilakukan pembagian tugas bagi petugas sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya serta kurangnya dukungan organisasi terhadap petugas pengelola kebersihan sehingga petugas kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Subarsono (2013:167) menyatakan bahwa :

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dari implementasi kebijakan sehingga hal ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti halnya kesesuaian dalam melakukan pembagian kerja bagi petugas pengelola sampah tentunya akan menunjang keberhasilan pengelolaan sampah.

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

Dengan demikian maka berdasarkan hasil wawancara dengan unsur masyarakat diketahui bahwa kurangnya dukungan sarana dan prasarana di tempat-tempat strategi sehingga menyebabkan sampah berserakan karena tempat sampahnya kurang memadai selain itu keberadaan tempat sampah yang sudah rusak namun belum diganti menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih kurang karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu mengelola sampah selain itu kurangnya dukungan sarana dan prasarana tempat sampah di berbagai lokasi yang ada di tempat strategi sehingga menyebabkan sampah berserakan.

Begitupula halnya dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat baik di lokasi wisata maupun pasar hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang berperan aktif dalam membantu melakukan pengelolaan sampah selain itu kurangnya tempat sampah yang memadai sehingga menyebabkan sampah berserakan.

#### **5. Sikap para pelaksana**

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan demikian sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah belum optimal hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman

petugas dalam melaksanakan tugasnya sehingga kurang sadar dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang menjadi tanggungjawabnya dan hal tersebut menyebabkan masih banyaknya sampah yang berserakan karena kurang rutinnya jadwal pengangkutan sampah.

Menurut Agustino (2014:118) menyatakan bahwa :

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelola sampah ditentukan oleh sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini petugas pengelola sampah yang memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam arti petugas yang memiliki tanggungjawab akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah belum optimal dalam menunjang keberhasilan

implementasi kebijakan sehingga masih ditemukan adanya petugas yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara bertanggungjawab.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum menunjang petugas dalam melakukan pengelolaan sampah hal ini dikarenakan petugas kurang mendapatkan anggaran yang memadai serta kurangnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga petugas kurang mampu melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik.

Menurut Agustino (2012:141) menyatakan bahwa :

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Oleh karena itu maka dalam implementasi kebijakan pengaruh lingkungan sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan seperti dukungan anggaran yang memadai sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan begitupula dengan dukungan dari berbagai pihak juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dukungan kemampuan petugas dalam menciptakan kondusifitas lingkungan sehingga tujuan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian dalam implementasi suatu kebijakan pengelolaan sampah belum optimal karena kurangnya dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Pangandaran belum optimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut :

Adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas dalam melakukan pengelolaan sampah karena kurangnya dilakukan pembagian tugas sehingga tujuan organisasi belum tercapai. Permasalahan lainnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar Dinas Pengelolaan Sampah dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah sehingga petugas kurang memiliki sikap yang positif terhadap keberhasilan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan lingkungan ekonomi sosial dan politik dalam memperlancar pengelolaan sampah.

Adanya berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah yang antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah

serta kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dan operasional pengelolaan sampah, kurangnya dukungan tersebut menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas.

Adanya upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah yang antara lain dengan melakukan kegiatan pengarahan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah hal ini dilakukan guna mengatasi keterbatasan jumlah petugas sehingga dengan adanya kegiatan pengarahan maka petugas dapat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah, selain itu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sehingga tetap dapat digunakan oleh petugas dalam melaksanakan pengelolaan sampah, upaya lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran yaitu dengan mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah serta melakukan peningkatan kegiatan pemungutan retribusi sampah sehingga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.

\_\_\_\_\_. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Damanhuri, Erni. (2005). *Pengelolaan Sampah*. Bandung : Departemen Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung

Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mulia, Ricky.M. (2015). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Edisi pertama, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Nunung Nurhayati, (2013), *Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Rahardyan B. dan Widagdo A.S., (2015). *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*. Materi Lokakarya 2

- Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta.
- Subarsono. AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrudin dan Priyambada, Bagus Ika. (2011). *Pengelolaan Limbah Padat. Diktat. Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip*: Semarang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di kabupaten Pangandaran
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Wahab, Abdul Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.